

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2020/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI UKM
SUB UNIT KERJA : BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : VERONICA HENNY EKA SAPUTRA
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KOPERASI
3. NHK : 750166

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 61.652.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 190 m2/54 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. Tanah Seluas 2618 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 36.652.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 56.000.000

1. MOBIL, SUZUKI KARIMUN Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
2. MOTOR, HONDA NF 100 SLD Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA NF 100 Tahun 1998, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 55.332.563**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 172.984.563**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 172.984.563

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **25 Agustus 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2020/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI UKM
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUNITA
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN
3. NHK : 741561

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	150.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/99 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	3.000.000
1. MOTOR, JUPITER JUPITER Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	926.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	153.926.000
III. HUTANG	Rp.	140.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	13.926.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **30 Juli 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2020/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI UKM
SUB UNIT KERJA : BIDANG PENGELOLAAN PASAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ENY SOELISTYAWATI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PERIZINAN DAN PENDAPATAN PASAR
3. NHK : 733731

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	11.000.000
1. MOTOR, YAMAHA JUPITER Tahun 2011, HASIL SENDIRI	Rp.	11.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	21.000.000
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	----
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	32.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	32.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **17 Juli 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2020/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI UKM
SUB UNIT KERJA : BIDANG PERINDUSTRIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : OKTARINA YULIASTANTI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI AGRO INDUSTRI
3. NHK : 742063

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.232.500.000**

1. Tanah Seluas 110 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/110 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 278 m2/278 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 139.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 171 m2/171 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 598.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 100.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ---****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. ---****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ---****Sub Total** **Rp. 1.332.500.000****III. HUTANG** **Rp. 205.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp. 1.127.500.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Agustus 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2020/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI UKM
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIAH ARI SETYOWATI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN
3. NHK : 721679

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	76.000.000
1. MOTOR, HONDA NF100SL Tahun 2006, LAINNYA	Rp.	1.000.000
2. MOTOR, HONDA XIB2R07LOA/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI	Rp.	6.000.000
3. MOTOR, HONDA D1B02N26L2 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI	Rp.	6.000.000
4. MOBIL, HONDA CITYZ SEDAN Tahun 2000, HASIL SENDIRI	Rp.	50.000.000
5. MOTOR, YAMAHA B3B A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI	Rp.	13.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.100.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	80.100.000
III. HUTANG	Rp.	30.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	50.100.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Juni 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.